PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar | Hari: Rabu | Tanggal: 01 Februari 2023 | Halaman: 8

Puluhan Warga Geruduk DPRD Kota Jogja

Pertanyakan Indikator KMS dan Sebut Banyak Tak Tepat Sasaran

ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

MENGADU: Sejumlah warga mengikuti audiensi di kantor DPRD Kota Jogja, Muja-Muju, Umbulharjo, Jogja, kemarin (31/1). Kedatangan mereka untuk mengadu karena tak lagi terdaftar sebagai penerima KMS.

JOGJA, *Radar Jogja* - Pulùhan warga yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi Kota Jogja mendatangi Kantor DPRD Kota Jogja, kemarin (31/1). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi keresahan tentang kebijakan serta indikator kepemilikan kartu menuju sejahtera (KMS).

Di antara mereka ada Liya. Liya merupakan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Gondokusuman. Dia merasa geram dengan temuannya di lapangan. Dia menyebut ada warga yang merupakan sarjana hukum. Yakni si istri. Sedangkan suaminya juga sarjana dan bekerja. "Tapi *kok* bisa dapat KMS," ketusnya dalam audiensi bersama sejumlah anggota DPRD Kota Jogja yang menerima mereka.

Warga Demangan, Gondokusuman, Kota Jogja ini berharap Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencabut KMS warga mampu. Jika dibutuhkan bukti, dia siap menyodorkan. "Si sarjana hukum ini awalnya mengaku kalau mobil di depan rumahnya punya saudaranya. Tapi saya nggak percaya. Saya tanya ke tetangganya, ternyata itu mobil mereka yang dibeli seharga Rp 30 juta," bebernya.

Liya pun merasa ironi. Di lingkungannya justru ada janda yang suaminya meninggal justru KMS-nya dicabut. Padahal janda ini memiliki anak yang masih bersekolah. "Jadi saya ke sini tidak menuntut untuk diri saya. Tapi saya ingin melaporkan," lanjutnya.

Pengurus Sosial Kampung Wirogunan, Mergangsan, Kota Jogja juga mempertanyakan indikator yang digunakan dalam penetapan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dia bingung, ada warganya yang mengadu padanya. Warga tersebut tercoret dalam DTKS. "Kami sebagai pengurus malah berbenturan dengan warga. Pekerja sosial tidak dapat apa-apa malah berkorban hati. Aspirasi kami, datang ke sini untuk memperjuangkan warga," lontarnya.

Salah satu ketua RT di Brontokusuman, Mergangsan, Kota Jogja pun mempertanyakan hal serupa. Perempuan yang datang mengenakan jilbab berwarna navy itu menyebut, warganya tinggal di atas Sultan Ground (SG). "Kalau KMS lolos berdasar survei dan foto, ada warga yang kerjaannya pemulung, rumah kontrak, tahun kemarin dapat, sekarang dicabut," cecarnya.

Dibeberkan lebih lanjut, pemulung itu biasa beroperasi di Depo Taman Hiburan Rakyat (THR). Dia memiliki dua anak yang duduk di bangku SMP dan SMA. "Ada juga dulu dapat, terus dicabut, padahal tukang ojek," sebutnya.

Menanggapi ini, Subkoordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinsos Nakertrans Kota Jogja Agus Budi meminta masyarakat melakukan aduan. Terutama pada Liya yang menemukan warga tidak semestinya memiliki KMS. "Dilaporkan saja ke Dinsos Nakertrans Kota Jogja. Bawa bukti-buktinya, supaya tahun KMS-nya dicabut," cetusnya.

Sementara terkait dengan adanya warga miskin tidak memiliki KMS, Agus meminta warga melakukan pendaftaran mandiri. Memang tidak akan langsung segera dilakukan penetapan. Sebab pengajuan yang terverifikasi, akan terlebih dahulu disurvei petugas. "Jadi warga ke sini, untuk mengajukan mandiri masuk DTKS. Sehingga nanti bisa diverifikasi. Kalau skornya masuk, nanti akan mendapat KMS," jabarnya.

Ketua RW 09 Kelurahan Keparakan Lor Kemantren Mergangsang Bambang Satrio menyampaikan, banyak penerima KMS yang tidak tepat sasaran. Bahkan dia menyebut banyak petugas survei yang salah mengisi data. "Seperti penghasilan Rp 500 Ribu menjadi Rp 5 Juta sehingga yang tadinya menerima KMS sekarang tidak," jelasnya.

Satrio mengharapkan untuk ke depan, survei KMS lebih baik lagi sehingga penerima KMS menjadi tepat sasaran. Ketua RW 07 Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondoman Nur Oriza Argo Selaku menambahkan, parameter penerima KMS tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat sekarang.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Suryani justru melontar ide stikerisasi rumah pemilik KMS. Hal ini dimaksudkan agar warga yang tidak memiliki kesadaran untuk mandiri, dapat merasa segan. "Kemarin sudah diusulkan, kalau bisa yang menerima diisen-isen. Maksudnya (rumah, Red) ditempeli stiker. Biar semua orang tahu dia KMS," tandasnya. **(fat/cr2/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005